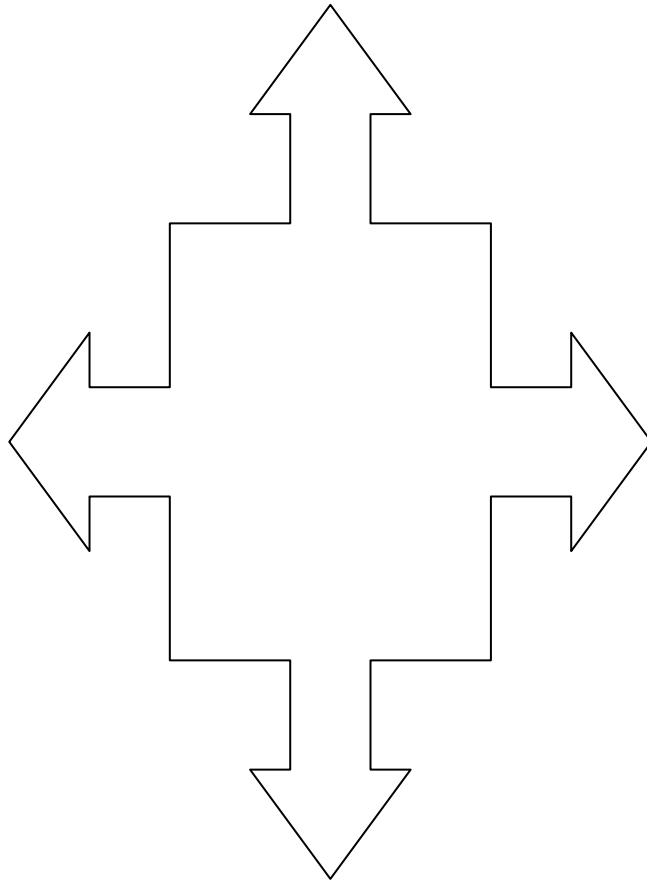




RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2013 – 2018



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raya Bona – Gianyar, Tlp. (0361) 944997, Fax. (0361) 943817
E-mail : dinaspugianyar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 sebagai wujud realisasi perencanaan pembangunan dan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* dalam periode lima tahunan.

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini dapat diketahui mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar selama lima tahun dari Tahun 2013 – 2018. Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Gianyar dan sekaligus diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Gianyar sesuai dengan amanat RPJMD 2005 – 2025

Mudah-mudahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar dapat memberikan informasi sesuai yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dari Tahun 2013-2018. Untuk itu masukan dan saran sangat diharapkan dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja pada lembaga ini di masa mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Gianyar, 18 Januari 2017

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Gianyar,**

Ir. Nyoman Nuadi, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590331 198710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	7
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
B. Sumber Daya SKPD	15
C. Kinerja Pelayanan SKPD	18
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	19
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	21
A. Identifikasi Permasalahan	21
B. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah	23
C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	27
D. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	33
BAB IV. VISI MISI DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34
A. Visi dan Misi SKPD	34
B. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD	35
C. Strategi dan Kebijakan	36
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	40
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD	47
BAB VII. PENUTUP	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	14
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	15
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pangkat Dan Golongannya	15
Tabel 3.	Kondisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dan Jabatannya ..	15
Tabel 4.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	16
Tabel 5.	Daftar Alat dan Kendaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	17
Tabel 6.	Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	18
Tabel 7.	Jumlah Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Ijin Mendirikan Bangunan	18
Tabel 8.	Kegiatan Fisik Jalan dan Jembatan	18
Tabel 9.	Data Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	21
Tabel 10.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2014 - 2018	43
Tabel 11.	Indikator Kinerja	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2008 – 2012	55
Lampiran 2	Realisasi Anggaran Tahun 2009-2013 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2014-2018	57
Lampiran 3	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2018	58
Lampiran 4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan daerah dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan global, sedangkan kuantitas pembangunan memiliki kebutuhan sumber daya, sehingga pencapaian hasil pembangunan selalu lebih mudah dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang telah diselesaikan.

Demikian pula proses pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Gianyar adalah merupakan bagian dari pembangunan di Propinsi Bali dan pembangunan Nasional yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesinambungan pembangunan, memberikan daya dukung tercapainya kondisi masyarakat yang lebih baik, dan pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam upaya meningkatkan keserasian Pembangunan Sektoral dan Pembangunan Daerah serta usaha menjalani laju perkembangan dan keseimbangan Pembangunan Kabupaten Gianyar diperlukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan serta Pengendalian berbasis masyarakat dengan melibatkan lebih banyak peran *stakeholder* yang mana nantinya diharapkan mampu menjembatani serta mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Pembangunan lingkup Prasarana, Sarana dan Utilitas pada suatu Daerah merupakan substansi dari Pembangunan secara menyeluruh dan memegang peranan sangat strategis untuk menunjang pembangunan sektor- sektor lainnya yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Sehubungan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang sepenuhnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun Rencana Strategis di bidang Pekerjaan Umum dalam 5 (lima) tahun, mulai tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun

anggaran 2018 sebagai acuan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar dimasa depan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Strategis Dinas memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar tahun 2013-2018.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerjanya dan profesionalisme.

Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggunakan metode Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan Analisis Lingkungan Internal (ALI). Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Pekerjaan Umum, kondisi lingkungan regional, serta lingkungan nasional. Sedangkan lingkungan Internal yaitu kondisi internal Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana/Peralatan dan Kebijakan Dinas. Kajian tersebut ditambah dengan hasil evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas periode sebelumnya.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2013-2018 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Gianyar Tahun 2013-2018, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan IPM yang meliputi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang, cipta karya, dan pertamanan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gianyar dari seluruh bidang tersebut di atas.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2013 –2018, berlandaskan :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Disamping itu mengacu pula pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyelesaian Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 86).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 disusun dengan maksud untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Gianyar dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik, dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Lebih rinci maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

- a) Renstra ini disusun dengan maksud sebagai acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan *stakeholder* dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2013-2018), dan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan).
- b) Memudahkan seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.

2. Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 adalah untuk memberikan arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas publik di Kabupaten Gianyar, sehingga akan didapat kejelasan, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Gianyar yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat,

mendorong swadaya dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan bertanggungjawab.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 secara rinci adalah :

- a) Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Gianyar tahun 2013-2018 lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b) Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 2013-2018.
- c) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan.
- d) Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Gianyar.
- e) Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kurun waktu 5 (lima) tahun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis SKPD adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

Bab ini berisilatar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB. II Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya yang dimiliki SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD sampai saat ini, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB. III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan telaahan dokumen RTRW Kabupaten dan kajian lingkungan hidup strategis, sertapenentuan isu-isu strategis di bidang ke-PU-an.

- BAB.IV** Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Bab ini berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
- BAB.V** Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB.VI** Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab ini berisi indikator kinerja SKPD yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB.VII** Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar merupakan perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 86), dinas dipimpin oleh Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas mempunyai tugas :

”Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah”

Untuk melaksanakan tugas pokok, dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang, cipta karya dan pertamanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang, cipta karya dan pertamanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang, cipta karya dan pertamanan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang, cipta karya dan pertamanan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang, cipta karya dan pertamanan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Unsur-unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
- b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- c) Koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan dinas;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- e) Pelaksanaan administrasi sekretariat;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran dinas; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

- a) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengawasan teknis sumber air, pembangunan sarana, peningkatan sumber daya air, pengawasan dan teknik pemeliharaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perencanaan, pengawasan teknis sumber air, pembangunan sarana, peningkatan sumber daya air, pengawasan dan teknik pemeliharaan sumber daya air;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengawasan teknis sumber air, pembangunan sarana, peningkatan sumber daya air, pengawasan dan teknik pemeliharaan sumber daya air;

- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pengawasan teknis sumber air, pembangunan sarana, peningkatan sumber daya air, pengawasan dan teknik pemeliharaan sumber daya air;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengawasan teknis sumber air, pembangunan sarana, peningkatan sumber daya air, pengawasan dan teknik pemeliharaan sumber daya air;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengawasan teknis sumber air, pembangunan sarana, peningkatan sumber daya air, pengawasan dan teknik pemeliharaan sumber daya air;
- f) Pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Air; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :

- a) Seksi Perencanaan, Pengawasan Teknis Sumber Air;
- b) Seksi Pembangunan Sarana dan Peningkatan Sumber Daya Air; dan
- c) Seksi Pengawasan dan Teknik Pemeliharaan Sumber Daya Air.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengawasan dan laboratorium pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perencanaan, pengawasan dan laboratorium pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan dan peralatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengawasan dan laboratorium pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan dan peralatan;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pengawasan dan laboratorium pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan dan peralatan;

- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengawasan dan laboratorium pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan dan peralatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengawasan dan laboratorium pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan, rehabilitasi jalan, jembatan dan peralatan;
- f) Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Marga; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a) Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Laboratorium;
- b) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
- c) Seksi Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Peralatan.

4. Bidang Penataan Ruang Ruang

Bidang Penataan Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f) Pelaksanaan administrasi Bidang Tata Ruang; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Penataan Ruang terdiri atas :

- a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan PLP dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan bangkim.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan PLP dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan bangkim;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan PLP dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan bangkim;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan PLP dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan bangkim;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan PLP dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan bangkim;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, pelaksanaan PLP dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan bangkim;
- f) Pelaksanaan administrasi di Bidang Cipta Karya; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Cipta Karya terdiri atas :

- a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- b) Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan
- c) Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.

6. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan taman ruang terbuka hijau.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan taman ruang terbuka hijau;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan taman ruang terbuka hijau;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan taman ruang terbuka hijau;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan taman ruang terbuka hijau;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan taman ruang terbuka hijau;
- f) Pelaksanaan administrasi di Bidang Pertamanan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pertamanan terdiri atas :

- a) Seksi Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b) Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- c) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau.

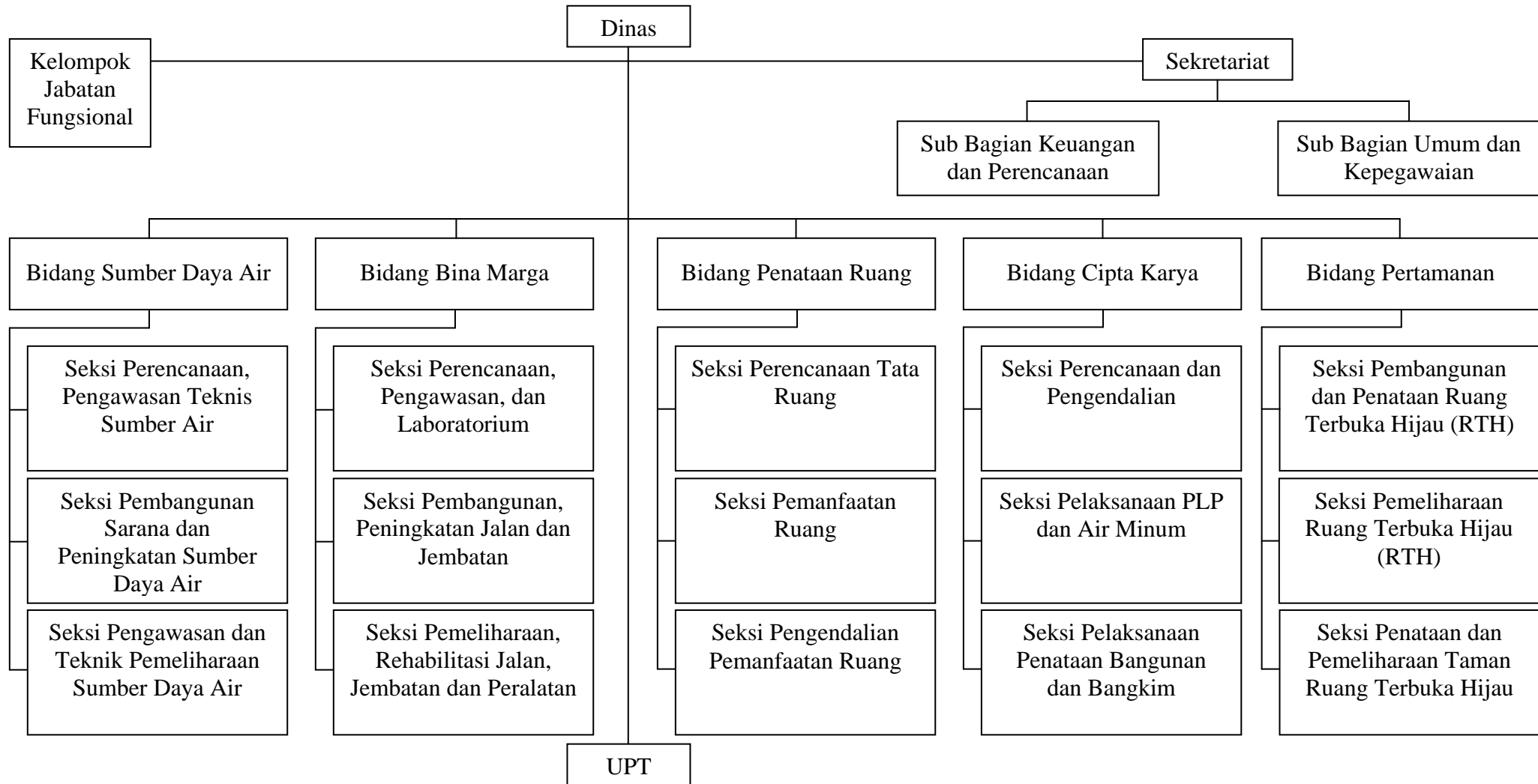
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar terdiri dari :

1. Dinas
2. Sekretariat :
 - a) Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - b) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Sumber Daya Air :
 - a) Seksi Perencanaan, Pengawasan Teknik Sumber Air;
 - b) Seksi Pembangunan Sarana dan Peningkatan Sumber Daya Air; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
4. Bidang Bina Marga :
 - a) Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Laboratorium;
 - b) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Peralatan.
5. Bidang Penataan Ruang :
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Bidang Cipta Karya :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan
 - c) Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.
7. Bidang Pertamanan :
 - a) Seksi Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b) Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - c) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH).
8. UPT
9. Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur Organisasi Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar



B. SUMBER DAYA SKPD

1. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar memiliki 218 orang pegawai dengan kriteria:

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

NO	PEGAWAI MENURUT JENISNYA	JUMLAH ORANG	KET
1	2	3	4
1	PNS	143	
2	Tenaga Harian	22	
3	Tenaga Harian Lepas	73	
	JUMLAH	218	

Tabel 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pangkat Dan Golongannya

NO	PANGKAT/GOLONGAN		JUMLAH	KET
1	2		3	4
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
2	Pembina Tk I	IV/b	2	
3	Pembina	IV/a	4	
4	Penata Tk I	III/d	7	
5	Penata	III/c	10	
6	Penata Muda Tk I	III/b	21	
7	Penata Muda	III/a	15	
8	Pengatur Tk I	II/d	-	
9	Pengatur	II/c	27	
10	Pengatur Muda Tk I	II/b	19	
11	Pengatur Muda	II/a	14	
12	Juru Tk I	I/d	2	
13	Juru	I/c	14	
14	Juru Muda Tk I	I/b	1	
15	Juru Muda	I/a	6	
	JUMLAH		143	

Tabel 3. Kondisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dan Jabatannya

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Pendidikan		
	Magister (S2)	6	
	Sarjana	44	
	Diploma	1	
	SLTA	66	
	SLTP	11	
	SD	15	
	Total	143	

1	2	3	4
2	Jabatan		
	Kepala Dinas	1	
	Sekretaris	1	
	Kepala Bidang	5	
	Kepala Sub Bagian	1	
	Kepala Seksi	12	
	Staf	123	
	Total	143	

2. Sarana dan Prasarana Pokok Yang Dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar memiliki 3 (tiga) unit gedung kantor untuk tempat operasional kegiatan.
- 2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sampai tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar memiliki peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai berikut :

Tabel 4. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
1.	Rak Kayu	17 buah
2.	Meja Kayu/rotan	28 buah
3.	Filling Besi	32 buah
4.	Mubeulair lainnya	3 buah
5.	Mesin Ketik Manual	10 buah
6.	Brand Kas	5 buah
7.	White board	2 buah
8.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	17 buah
9.	Kursi Tamu	4 set
10.	Kursi Lipat	35 buah
11.	Lemari Besi	6 buah
12.	Meja Komputer	8 buah
13.	Meja Biro	13 buah
14.	Pesawat Telepon	12 buah
15.	CPU/Televisi	1/1 buah
16.	Jam Elektronik	1 buah
17.	Lambang Garuda Pancasila	1 buah
18.	Kursi Putar	9 buah
19.	Meja Rapat	2 set
20.	Faximile	3 buah
21.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2 buah
22.	PC Unit	22 buah
23.	Mesin Calculator	18 buah
24.	Alat Penggandaan	1 buah
25.	Sofa	5 set
26.	Kipas Angin	3 buah
27.	Laptop	13 buah

1	2	3
28.	Gerobak Dorong	2 buah
29.	Pompa air	1 buah
30.	Rol Meter	10 buah
31.	Pacul	10 buah
32.	Garpu pacul	5 buah
33.	Skop	7 buah
34.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya	80 unit
35.	Arit	4 buah
36.	Lemari Kayu	7 buah
37.	Mesin Pengisap Debu	1 buah
38.	AC	12 buah
39.	Wirelles	3 buah
40.	Dispenser	1 buah
41.	UPS/Stabilizer	9/2 buah
42.	Cainsow	1 buah
43.	Alat Pengukur Curah Hujan	6 buah
44.	Mesin Potong Rumput	33 buah
45.	Tustel/Camera Film	18 buah
46.	Monitor	3 buah
47.	Alat RT/Alat Ukur	2 buah
48.	Peralatan Handycam	7 buah
49.	Papan nama Instansi	1 buah
50.	Camera Electric	1 buah
51.	Kursi Besi	1 buah
52.	Proyektor	3 buah
53.	Kursi Putar	6 buah
54.	Lemari Arsip	1 buah
55.	Sound System	1 buah
56.	Handycam	2 buah
57.	Kursi Rapat	17 buah
58.	Printer	30 buah
59.	Camera Video	2 buah
60.	Peralatan Personal Komputer	12 buah
61.	Note Book/Hard Disk	30/2 buah
62.	Peralatan Jaringan Lainnya	2 buah
63.	Peralatan Komunikasi Lainnya	2 buah
64.	Alat Ukur Lainnya	6 buah
65.	Alat kantor Lainnya	2 buah

3) Untuk menunjang operasional kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar memiliki alat dan kendaraan sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar Alat dan Kendaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

No.	Jenis	Jumlah
1	2	3
1.	Roller/Vibration Roller	6 buah
2.	Trailer/Matra TR-200	2 buah
3.	Excavator	1 buah

1	2	3
4.	Loader	2 buah
5.	Atlas Copco/Air Compressor	2 buah
6.	Truck /Attachment	8 buah
7.	Pick Up	5 buah
8.	Mitubishi/L 300 GP	1 buah
9.	Toyota Kijang/ Angkutan Barang	5 buah
10.	Toyota Avanza	1 buah
11.	Sepeda Motor Honda	23 buah
12.	Sepeda Motor Yamaha	2 buah
13.	Sepeda Motor Suzuki/Kawasaki	7 buah

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Sampai dengan Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar telah melaksanakan pelayanan sebagai berikut:

Tabel 6. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

No	Jenis Pendapatan	Th.2011 (Rp.)	Th.2012 (Rp.)	Th.2013 (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Penerimaan Sewa Wales /Pungutan lain-lain	12.775.000,00	11.000.000,00	13.750.000,00 Masuk ke pendapatan lain-lain	
2.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	5.941.643,00	7.446.300,00	7.587.573.215,00	

Pemberian Ijin Usaha jasa Konstruksi dan Ijin Mendirikan Bangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Ijin Mendirikan Bangunan

No.	Uraian	Th.2011	Th. 2012	Th. 2013	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi	23 buah	13 buah	18 buah	
2.	Ijin Mendirikan Bangunan	712 buah	978 buah	722 buah	

Tabel 8 Kegiatan Fisik Jalan dan Jembatan

No.	Kegiatan	Th.2011	Th. 2012	Th. 2013	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Jalan	20 km		10,90 km	
2	Pembangunan Jembatan		1 Jembatan Br. Tegehe Batuan		

1	2	3	4	5	6
3	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	3.60 km	6.20 km	5.50 km	
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana Pendukung Jalan	1200 km	1200 km	1200 km	
5	Rehabilitasi Jalan	11.58 km		11.95 km	
6	Pemeliharaan Jalan		19,40 km	33,54 km	

Kinerja Pelayanan SKPD lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Gianyar 2013-2018, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-faktor peluang/pendukung yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor tantangan/penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Gianyar selama 5 (lima) tahun kedepan, terinventarisasi beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan:

1. Faktor Peluang

- a. Adanya sumber daya manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme
- b. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, dan peralatan kantor
- c. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya
- d. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
- e. Perkembangan TI dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan

2. Faktor Tantangan

- a. Belum optimalnya peran dan produktifitas kinerja pegawai
- b. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki
- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat dibidang pelayanan umum yang bermutu

- d. Adanya krisis kepercayaan terhadap kinerja aparatur pemerintah
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB.

Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar adalah:

1. Terpedomani semua peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Optimalisasi SDM yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan
3. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional
4. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik
5. Tersedianya basis data/data base yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya
6. Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Gambaran umum permasalahan kondisi data dasar prasarana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 9. Data Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar

No	Uraian	Satuan	Tahun			Ket
			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7
I	Bidang Bina Marga					
	1. Status Jalan :					
	a. Nasional	Km	40,360	40,360	48,790	
	- Baik	Km	-	-	42,720	
	- Sedang	Km	-	-	6,070	
	- Rusak Ringan	Km	-	-	-	
	b. Provinsi	Km	111,110	111,110	111,110	
	- Baik	Km	-	-	52,650	
	- Sedang	Km	-	-	37,560	
	- Rusak Ringan	Km	-	-	20,900	
	c. Kabupaten	Km	555,538	555,538	555,538	
	- Baik	Km	171,330	181,530	226,350	
	- Sedang	Km	294,130	291,130	230,013	
	- Rusak Ringan	Km	79,578	73,378	87,475	
	- Rusak Berat	Km	10,50	9,500	11,700	
	2. Jenis Permukaan Jalan Kabupaten					
	a. Aspal					
	- Lapen	Km	136,075	131,075	110,075	
	- Hotmix	Km	408,063	415,963	437,763	
	b. Berbatu	Km	2,500	2,500	-	
	c. Kapur	Km	0,500	0,500	-	
	d. Tanah	Km	10,500	8,500	7,700	
	3. Jembatan					
	a. Panjang	M	1.635.100	1.635.100	1.677.100	
	b. Jumlah	Bh	61	61	62	
	4. Status Jembatan					
	a. Jembatan Negara					
	- Panjang	M	348.000	348.000	348.000	
	- Jumlah	Bh	14	14	14	
	- Kondisi Baik	Bh	14	14	14	
	b. Jembatan Provinsi					
	- Panjang	M	362.100	362.100	362.100	
	- Jumlah	Bh	12	12	12	
	- Kondisi Baik	Bh	12	12	12	
	c. Jembatan Kabupaten					
	- Panjang	M	925.000	925.000	967.000	

1	2	3	4	5	6	7
	- Jumlah	Bh	35	35	36	
	- Kondisi Baik	Bh	19	19	19	
	- Kondisi Sedang	Bh	15	15	14	
	- Kondisi Rusak Ringan	Bh	1	1	3	
	d. Jalan Swadaya	Km	1.086,335	1.086,335	1.086,335	
II	Bidang Cipta Karya					
	1. Trotoar	M1	254.027,50	270.373,00	279.430,00	
	a. Kondisi Baik	M1	207.473,70	162.223,00	167.658,00	
	b. Kondisi Rusak Ringan	M1	39.730,30	67.593,00	69.862,00	
	c. Kondisi Rusak Berat	M1	6.823,50	40.556,00	41.918,00	
	2. Saluran Drainase	M1	2.215.623,00	2.099.311,40	2.215.702,00	
	a. Saluran Pasangan/ Beton	M1	2.203.173,00	2.086861,40	2.203.252,00	
	- Kondisi Baik	M1	1.295.563,30	1.301.245,68	1.294.366,20	
	- Kondisi Rusak Ringan	M1	884.445,60	783.046,00	785.227,20	
	- Kondisi Rusak Berat	M1	23.164,10	2.569,02	7.268,00	
	b. Saluran Alami	M1	12.450,00	12.450,00	12.450,00	
III	Bidang Sumber Daya Air					
	1. Jumlah DI	Bh	133	133	68	
	2. Luas DI	Ha	17,850	17,877	4,222	
	3. Luas Areal Tanam	Ha	16,034	16,002	3,645	
	4. Rencana Panen	Ha	14,91	14,767	3,645	
	5. Indek Pertanaman (%)	%	94,14	94,14	200	
	6. Saluran					
	a. Primer	M	334.154	334.154	145.949	
	b. Sekunder	M	166.579	166.579	16.464	
	c. Tersier	M	483.503	483.503	115.774	
	7. Kondisi Saluran					
	a. Baik	%	49,50	49,72	67,79	
	b. Rusak Ringan	%	49,75	49,53	32,21	
	c. Rusak Berat	%	0,75	0,75	0	
	8. Bangunan Sadap/Bagi	Bh	828	828	206	
	9. Bangunan Lainnya	Bh	96	96	73	
IV	Bidang Penataan Ruang					
	1. IMB Yang Diterbitkan	Bh	167	908	722	
V	Sekretariat Dinas					
	1. IUJK Yang Diterbitkan	Bh	23	13	18	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar telah melakukan identifikasi permasalahan diantaranya:

1. Curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya genangan yang berdampak pada kerusakan jalan, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar agar kondisi jaringan infrastruktur transportasi jalan dapat berfungsi dengan baik

2. Belum tersedianya informasi berupa Peta Digital yang memuat info tentang RTRW Kabupaten dan Rencana Rincinya dalam bentuk Peta Digitasi yang dapat dengan mudah di akses.
3. Belum tersedianya Peta Analog yang memuat info Rencana Struktur dan Pola Ruang
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus/membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk sehingga menyebabkan terjadi genangan.
6. Kondisi dan fungsi jaringan irigasi diperlukan adanya peningkatan kualitas saluran agar air irigasi tidak banyak yang bocor/hilang.
7. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan bagi masyarakat miskin belum terpenuhi.
8. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan ketersediaan air baku bagi pertanian dan domestik.
9. Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang dan belum memiliki IMB.
10. Pesatnya perkembangan pembangunan sering mengakibatkan pengawasan dan pengendalian bangunan mengalami kendala karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan.
11. Dengan cepatnya laju perubahan fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman
12. Pembangunan saluran drainase dan saluran irigasi khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran/kesadaran membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik

B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gianyar sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018.

Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Gianyar dijabarkan dalam RPJPD 2005-2025 (20 tahun), selain itu mengacu pula pada usulan-usulan dari tingkat kecamatan, dan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Gianyar.

Dengan demikian Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus menggambarkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat Kabupaten Gianyar melalui Musrenbang, KUA, RPJMD dan RPJPD.

Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali adalah BALI MANDARA yakni **”Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera”**

Penjabaran makna dari Visi tersebut : Bali Maju adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma. Bali Aman adalah Bali yang ”dabdad” teratur sekala niskala, dan Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan nya sejalan dengan konsep Tri Hita Karana. Bali Damai adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir batin serta selalu dalam kondisi “tis” dan kondusif. Bali Sejahtera adalah adalah Bali yang Sukerta Sekala Niskala, sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan, dan kedamaian.

Misi yang disampaikan sebagai penjabaran dari visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern.
2. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman.
3. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Batin.

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal ini ditunjukkan melalui:

1. Pernyataan misi ke 2 : Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman. Pada misi kedua ini terlihat jelas peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam membuat perencanaan pembangunan menyelaraskan konsep rencana program dengan mengacu tata ruang dan lingkungan hidup. Penataan ruang, pengendalian, dan pemanfaatan ruang, penyediaan sarana, prasarana dan utilitas publik, meningkatkan profesionalisme aparatur penataan ruang, penerapan RTRW secara konsisten, dan menjaga kelestarian dan keberlanjutan pembangunan.
2. Pernyataan misi ke 3 : Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Batin. Pada misi ketiga ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam pekerjaan umum mengembangkan air baku dan irigasi yang memadai, serta

mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, mengefisienkan penggunaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang, Perda ketinggian bangunan dan daya dukung lingkungan.

Sementara Visi pembangunan Kabupaten Gianyar lima tahun ke depan adalah:

”TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS (BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA) MENUJU JAGADHITA”

”GIANYAR-BAGUS”, yang mengandung pengertian Bagus berarti baik, elok, indah atau cemerlang.

BAGUS merupakan singkatan dari Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera dengan makna yang dimaksud:

1. Terwujudnya Gianyar yang BERSIH, meliputi:

Terwujudnya aparaturnya pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas, profesional, berjiwa *enterpreneur*, dan *responsive*, penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good and clean govermance*), dan bebas KKN, sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik, sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha dalam mempercepat proses pembangunan.

2. Terwujudnya Gianyar ALAMI, meliputi:

Terwujudnya lingkungan Gianyar yang alami dan lestari, lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (*clean and green*), terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terkendalinya lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.

3. Terwujudnya Gianyar GIAT, meliputi :

Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat bekerja, kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk membangun dan mengembangkan usaha, yang berbasis ekonomi kerakyatan. Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tangguh, berjiwa *entrepreneurship*, peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat, serta terwujudnya aparaturnya pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.

4. Terwujudnya Gianyar BERBUDAYA, meliputi:
Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan *swadharmaning negaradan swadharmaning agama* bagi masyarakat Gianyar, peningkatan *sradha* dan *bhakti*, masyarakat yang temtram, rukun, dan damai berdasarkan semangat *selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya*, dengan semangat *manyama braya*. Terwujudnya peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dan mampu berdaya saing, kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama serta terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Terwujudnya Gianyar SEJAHTERA, meliputi:
Terwujudnya peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan berkurangnya kesenjangan sosial, terwujudnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pengarusutamaan *gender* dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, adanya kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, serta tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perkonomian desa dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan 2013-2018 disusun Misi Pembangunan Kabupaten Gianyar lima tahun mendatang yaitu:

1. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa *entrepreneur* yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial.
3. Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (*One Village One Product*), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi *entrepreneur*.
4. Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan religiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa *pakraman*, *banjar*, *subak*, dan *sekaa-sekaa* serta institusi institusi yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama.

5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, beintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan remunerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar.

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah memberikan peran serta dan keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal ini ditunjukkan melalui :

- Pernyataan misi ke 2 : Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan. Pada misi kedua ini terlihat jelas peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam membuat perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyediaan sarana, prasarana dan utilitas publik sebagai wadah yang digunakan melaksanakan aktifitas ekonomi dan pengembangan potensi unggulan wilayah yang berdaya saing, guna terwujudnya Gianyar yang alami dan terbebas dari masalah lingkungan dan sosial.

C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang. Adapun visi Kementerian Pekerjaan Umum adalah: **”Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”**. Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;

3. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
4. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
5. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
6. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang;
7. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, maka Misi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spesial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang

akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Tujuan yang dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untuk terlaksananya pengembangan wilayah dan pembangunan nasional serta daerah yang terpadu dan sinergis bagi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar bidang permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang pekerjaan umum.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi.

Adapun sasaran strategis berdasarkan 5 (lima) tujuan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan dicapai meliputi :

1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang
2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan
3. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir
4. Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa
5. Meningkatnya kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km
6. Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah

7. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang
8. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan
9. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat
10. Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur permukiman
11. Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan infrastruktur yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
12. Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
13. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
14. Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik
15. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi di pusat dan daerah
16. Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai.

Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka prioritas pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman 2010–2014 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.
3. Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di semua tingkatan pemerintahan.
5. Integrasi Rencana Tata Ruang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku bagi domestik, pertanian, dan industri secara berkelanjutan serta mengurangi tingkat resiko akibat daya rusak air.
7. Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.
8. Pengembangan perumahan dan permukiman untuk peningkatan hunian yang layak dan produktif.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RTRW Kabupaten Gianyar berkedudukan sebagai penjabaran dari RTRW Nasional, Provinsi Bali dan menjadi matra ruang dari RPJPD, acuan penyusunan RPJMD, rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten, dan acuan *sukerta tata palemahan* desa adat/pakraman yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig* desa adat/pakraman di seluruh Kabupaten Gianyar. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri budaya Bali, dan berkelanjutan terintegrasi dengan kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang didukung sektor pertanian, perdagangan/jasa dan industri kerajinan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :

1. Pengembangan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan karakter wilayah.
2. Penataan pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan yang merata, berhirarki dan terintegrasi dengan kawasan perdesaan.
3. Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata.
4. Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian.
5. Pengelolaan pemanfaatan lahan wilayah Kabupaten dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya dukung, mitigasi bencana, dan aspek konservasi.
6. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama wilayah dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung pengembangan dan peningkatan angkutan barang, pemasaran hasil pertanian, perikanan, industri kerajinan dan pariwisata.
7. Pengembangan industri kerajinan yang ramah lingkungan.
8. Pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya.
9. Pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten diwujudkan dengan :

1. Mengarahkan wilayah Gianyar sebelah barat sebagai dominasi kawasan pengembangan pariwisata dengan berbasis kebudayaan Bali dan industri kerajinan.
2. Mengarahkan wilayah Gianyar sebelah timur sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan serta wisata remaja/rekreasi.
3. Mengarahkan wilayah Gianyar sebelah selatan sebagai dominasi kawasan perdagangan/jasa dan wisata belanja serta pertanian.

4. Mengarahkan wilayah Gianyar sebelah utara sebagai dominasi kawasan pengembangan pertanian dan konservasi daerah resapan air.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pengembangan pariwisata budaya, pertanian, perdagangan/jasa dan industri kerajinan, baik di dalam wilayah pengembangan maupun antara wilayah pengembangan.

Sementara ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui :

1. Ketentuan umum peraturan zonasi,
2. Ketentuan perizinan,
3. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif,
4. Arahan sanksi.

Pengembangan wilayah Kabupaten Gianyar dilakukan dengan beberapa pembagian wilayah/zona yang masing-masing memiliki karakter. Secara administrasi RTRWK Gianyar terdiri atas 7 (tujuh) wilayah kecamatan meliputi ; 1) Kecamatan Gianyar, 2) Kecamatan Blahbatuh, 3) Kecamatan Sukawati, 4) Kecamatan Ubud, 5) Kecamatan Payangan, 6) Kecamatan Tegallalang, 7) Kecamatan Tampaksiring. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta kawasan strategis wilayah yang telah ditetapkan, dan arahan pemanfaatan ruang dilakukan melalui indikasi program utama pemanfaatan ruang yang diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi ; 1) KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, 2) KSK berdasarkan kepentingan sosial dan budaya, 3) KSK berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan hidup meliputi; 1) Sistem penyediaan air minum (SPAM), 2) Sistem pengelolaan persampahan, 3) Sistem jaringan air limbah, 4) Sistem jaringan drainase, 5) Jalur evakuasi bencana. Untuk jaringan jalan salah satunya adalah jalan skunder yang meliputi : jalan lokal, peningkatan fungsi jalan lokal, jalan lingkungan, dan pengembangan jalan skunder.

Berdasarkan uraian diatas dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengacu pada kebijakan penataan wilayah, strategi penataan wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan jaringan jalan, pengembangan wilayah dan penetapan kawasan strategis yang ada.

E. PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.
2. Belum optimalnya fungsi drainase gorong-gorong sebagai pematas air hujan yang mengakibatkan timbulnya genangan dan mencegah terjadinya banjir.
3. Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman.
4. Sarana prasarana permukiman untuk menekan prosentase permukiman kumuh dengan memperhatikan kondisi sanitasi , drainase , jalan kampung, pengolahan limbah untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya.
5. Meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan jumlah kebutuhan air bersih dan limbah dasar.
6. Saluran limbah rumah tangga / asseinering sebagai pendukung kebersihan lingkungan.
7. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan bagi masyarakat miskin belum terpenuhi.
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk peningkatan ketersediaan air baku bagi pertanian dan domestik.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dalam peningkatan kebersihan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan dan bangunan, penegakan hukum tata ruang dan bangunan, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan belum memenuhi target atau amanat peraturan perundang-undangan.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus/membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
11. Kondisi dan fungsi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya perlu perbaikan untuk mencegah terjadinya kebocoran air.
12. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam kegiatan pengelolaan kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Gianyar.
13. Luasnya cakupan wilayah dan terbatasnya ruang terbuka hijau yang ada.
14. Pelayanan kepada masyarakat agar dapat diterapkan sesuai dengan standar pelayanan publik.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI SKPD

Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas publik dalam rangka meningkatkan daya dukung, daya tampung dan memberi pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat adalah merupakan tuntutan sesuai perkembangan dan pertumbuhan masyarakat di Kabupaten Gianyar.

Dalam rangka tercapainya sasaran yang lebih optimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar berusaha untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan penyiapan program pembangunan fisik secara terencana, terlaksana dan terkendali lebih efisien dan efektif, berwawasan lingkungan mengacu kepada konsep Agama Hindu, adat dan budaya di Kabupaten Gianyar utamanya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Gianyar yaitu **”Terwujudnya Gianyar Bagus (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, Sejahtera) Menuju Jagadhita”**.

Untuk dapat mencapainya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menentukan Visi sebagai gambaran yang memuat tentang keadaan masa depan yang mengandung cita-cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh instansi pemerintah agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar adalah :

Terwujudnya jaringan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta adanya ruang terbuka hijau yang memadai dan mampu mendorong peningkatan sosial dan perekonomian masyarakat

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar adalah :

1. Penyediaan jaringan infrastruktur dan sarana prasarana kebinamargaan untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur keciptakarya dalam upaya penanggulangan banjir dan mewujudkan lingkungan yang asri.
3. Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai peruntukannya.
4. Menyelenggarakan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya untuk dapat mendorong peningkatan produksi hasil pertanian.
5. Meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau dan ketersediaan taman yang memadai.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Agar Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar dapat tercapai, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terinci. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dari masing-masing misi sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana infrastruktur kebinamargaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur keciptakaryaan.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untuk terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
5. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan taman.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan taman.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam hal pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau.
8. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ada.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing Misi dan Tujuan yang telah diterapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan. Sasaran merupakan kegiatan integral dari proses perencanaan strategis untuk menentukan dan mengendalikan kegiatan satuan kerja. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar adalah :

1. Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang baik.
2. Tersedianya alat-alat berat dan sarana lainnya sebagai penunjang kegiatan kebinamargaan.
3. Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang baik.
4. Tersedianya informasi penataan ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Terwujudnya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik.
6. Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
7. Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah merupakan suatu pendekatan umum untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin akan timbul, baik dari dalam maupun dari luar unit kerja, sehingga untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan dapat terwujud. Untuk mencapai tingkat kinerja yang diinginkan ditetapkan strategis organisasi yang merupakan suatu kebutuhan dan rangkaian yang menyeluruh dan terpadu yang tertuang di dalam suatu perencanaan organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Hasil Identifikasi lingkungan strategik yang mempengaruhi sasaran baik dari internal maupun eksternal, berdasarkan kondisi tersebut berikut ini disampaikan analisa satuan organisasi sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strengths)

- a) Adanya sejumlah tenaga aparatur
- b) Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
- c) Adanya motivasi kerja apratur
- d) Tersedianya sejumlah anggaran untuk kegiatan

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a) Kurangnya tenaga teknis dibandingkan dengan banyaknya infrastruktur yang ditangani
- b) Kurangnya validasi data tiap tahun
- c) Belum optimalnya produktivitas kerja pegawai
- d) Kurangnya sarana dan prasarana kerja

Selain kondisi internal organisasi, faktor eksternal organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan organisasi. Faktor Eksternal tersebut yang terdiri dari peluang Organisasi dan ancaman yang harus dihadapi oleh suatu organisasi. Peluang organisasi berkaitan erat dengan kesempatan suatu organisasi untuk memanfaatkan kondisi diluar organisasi dengan potensi yang dimiliki, sedangkan ancaman adalah segala kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Adapun peluang dan ancaman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

1. Peluang (Opportunities)

- a. Koordinasi melalui teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan
- b. Pemanfaatan jasa pihak ketiga sangat mendukung kelancaran dan percepatan pembangunan
- c. Tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan inprastruktur
- d. Adanya program pembangunan yang berkelanjutan

2. Tantangan (Threaths)

- a. Meningkatnya beban kerja dan semakin komplek
- b. Peraturan sering berubah-ubah peluang diklat kecil
- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat dibidang pelayanan umum yang bermutu
- d. Kesadaran/ partisipasi masyarakat untuk gotong-royong perlu ditingkatkan

Penetapan strategi suatu organisasi baik intern maupun ekstern hal ini akan dapat berpengaruh terhadap visi dan misi. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kondisi jalan dan jembatan yang laik jalan dan memenuhi standar.
2. Peningkatan jumlah dan kondisi alat-alat berat dalam kondisi siap pakai untuk menunjang kegiatan kebinamargaan.
3. Peningkatan kapasitas dan fungsi saluran drainase dan gorong-gorong untuk memperlancar saluran air.
4. Peningkatan sarana air limbah dalam upaya menciptakan sistem sanitasi yang layak sebagai pendukung kebersihan lingkungan.
5. Peningkatan sarana air minum bagi masyarakat.
6. Peningkatan kondisi perumahan masyarakat sehingga layak huni.
7. Menyediakan sarana prasarana infastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh.
8. Peningkatan integrasi Rencana Tata Ruang ke dalam dokumen pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perbaikan sarana jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya yang dapat mendukung pemanfaatan air irigasi untuk pertanian.
10. Mengelola kebersihan dan pertamanan serta ruang terbuka hijau melalui penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

11. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan serta ruang terbuka hijau.
12. Peningkatan layanan kepada masyarakat dalam hal administrasi surat menyurat, pengurusan ijin usaha jasa konstruksi, dan pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum adalah pembangunan, peningkatan dan perbaikan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur jalan, irigasi, prasarana air bersih perdesaan, penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi), dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman lainnya seperti drainase air limbah.

Dalam mencapai tujuan pembangunan jaringan infrastruktur yang telah tersusun dalam sasaran, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut yaitu:

1. Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas wilayah yang menjamin pengguna jalan selamat dan nyaman.
2. Menyediakan dan melaksanakan pemeliharaan terhadap alat-alat berat dan sarana prasarana lainnya yang menunjang kegiatan kebinamargaan.
3. Peningkatan kondisi infrastruktur drainase dan gorong-gorong untuk memperlancar saluran air dalam upaya penanggulangan banjir.
4. Mendorong penyediaan sarana sanitasi dasar yang terjangkau oleh masyarakat.
5. Pembangunan prasarana dan sarana air minum yang bertumpu pada kemampuan daerah.
6. Penyediaan bangunan rumah sederhana sehat untuk masyarakat yang membutuhkan.
7. Peningkatan kondisi infrastruktur permukiman dan pemerataan jenis dan sebarannya di seluruh wilayah, terutama pada daerah-daerah cepat tumbuh.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya melalui peningkatan peran serta masyarakat dan penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah serta pengawasan pemanfaatan ruang.
9. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya untuk peningkatan fungsinya.
10. Peningkatan peran aktif subak/petani pemakai, dalam pemeliharaan jaringan irigasi, baik di tingkat sumber air maupun usaha tani.
11. Mengelola kebersihan dan pertamanan serta ruang terbuka hijau melalui penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

12. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan serta ruang terbuka hijau.
13. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan administrasi perkantoran.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013 – 2018 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2013-2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 1.1. Perencanaan Pembangunan Jalan
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 2.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - 2.2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana Pendukung Jalan
 - 2.3. Rehabilitasi Jalan
 - 2.4. Pemeliharaan Jalan
 - 2.5. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan
3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - 3.1. Inspeksi Kondisi Jalan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
 - 4.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - 5.1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - 5.2. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - 6.1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

- 6.2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
- 6.3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 6.4. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 7.1. Perlindungan dan Penataan Mata Air
8. Program Pengembangan Perumahan
 - 8.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
9. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - 9.1. Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah
 - 9.2. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan
10. Program Perencanaan Tata Ruang
 - 10.1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 10.2. Survey dan Pemetaan
11. Program Pemanfaatan Ruang
 - 11.1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
 - 11.2. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 12.1. Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 12.2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang
 - 12.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 13.1. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
 - 13.2. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
 - 13.3. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi
 - 13.4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi
14. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 14.1. Pemeliharaan RTH
15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 15.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 15.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran
- 16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 16.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 16.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 16.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 16.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 16.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 16.6. Pembangunan Rumah Dinas
 - 16.7. Pembangunan Gedung Kantor
 - 16.8. Pengadaan Prasarana Pemerintahan
- 17. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 17.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2013-2018 terdiri dari :

A. Indikator Sasaran

1. Prosentase meningkatnya kondisi jalan kategori baik
2. Prosentase berkurangnya kondisi jalan kategori rusak
3. Prosentase jumlah jembatan baru yang terbangun
4. Prosentase meningkatnya kondisi jembatan yang baik
5. Prosentase berkurangnya jembatan yang rusak
6. Meningkatnya kondisi alat-alat berat siap pakai untuk menunjang kegiatan Kebinamargaan
7. Prosentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik
8. Prosentase rumah tangga bersanitasi
9. Prosentase perdesaan yang sudah memiliki air bersih
10. Prosentase kondisi perumahan yang layak untuk keluarga miskin
11. Prosentase kondisi sarana dan prasarana permukiman meningkat
12. Prosentase bangunan dan lingkungan yang tertata
13. Prosentase yang disurvei dan dilakukan pemetaan
14. Prosentase fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
15. Prosentase pemanfaatan ruang yang sudah diawasi
16. Prosentase jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik
17. Prosentase luas RTH yang tertangani
18. Prosentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran

B. Indikator Kinerja Program (Outcome) :

1. Meningkatnya prosentase kondisi jalan dan jembatan baik
2. Tersedianya informasi tentang kondisi jalan dan jembatan
3. Terwujudnya sarana kebinamargaan yang siap pakai
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
5. Terwujudnya penyediaan air bersih dan saluran air limbah
6. Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi masyarakat
7. Terwujudnya rumah layak huni

8. Tersedianya sarana dan prasarana permukiman
9. Tersedianya informasi rencana tata ruang di Kabupaten Gianyar
10. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
11. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang kawasan
12. Terwujudnya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik
13. Terwujudnya kawasan ruang terbuka hijau dan ketersediaan taman yang memadai
14. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
15. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
16. Meningkatnya disiplin pegawai

C. Indikator Kinerja Kegiatan (Output) :

1. Tersedianya perencanaan jalan
2. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan
3. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan rutin/sarana pendukung jalan
4. Terlaksananya rehabilitasi jalan
5. Terlaksananya pembuatan/rehabilitasi jembatan
6. Terlaksananya pemeliharaan jalan
7. Terlaksananya peningkatan/rehabilitasi jalan
8. Terlaksananya inspeksi jalan
9. Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat kebinamargaan
10. Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
11. Terlaksananya rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
12. Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana air limbah
13. Terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah yang ada
14. Terlaksananya penataan lingkungan menuju sumber mata air
15. Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat
16. Tersedianya sarana air minum di perdesaan
17. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perumahan
18. Terlaksananya pembangunan fasilitas umum/ibadah
19. Terlaksananya pembangunan/perbaikan jalan lingkungan
20. Tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan
21. Tersedianya sarana pengendalian tata ruang
22. Tertib dalam pemanfaatan ruang kawasan
23. Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

24. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur di bidang TI tentang pengendalian pemanfaatan ruang
25. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang
26. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang
27. Terlaksananya pembangunan jaringan distribusi air bersih
28. Berfungsinya secara optimal jaringan irigasi yang telah dibangun
29. Terlaksananya rehabilitasi dan meningkatnya fungsi jaringan irigasi
30. Terpeliharanya jaringan irigasi
31. Terwujudnya taman hiburan rakyat dan terpeliharanya taman kota, telajakan dan perindangan jalan
32. Tersedianya administrasi dan prasarana kantor
33. Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
34. Tersedianya perlengkapan gedung kantor
35. Tersedianya peralatan gedung kantor
36. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
37. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
38. Tersedianya bangunan rumah dinas
39. Tersedianya bangunan gedung kantor
40. Tersedianya prasarana pemerintahan
41. Tersedianya pakaian dinas pegawai

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini :

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan program kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat daerah ini adalah rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013 -2018 mendatang yang dipergunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan kinerja organisasi khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar.

Program kerja yang telah disusun diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Gianyar dan peningkatan fungsi kelembagaan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh faktor baik intern maupun exstern organisasi sehingga potensi organisasi harus dikembangkan secara optimal dalam rangka mewujudkan arah dan sasaran yang telah disepakati.

Demikian Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program Pembangunan.

Gianyar, 18 Januari 2017

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Gianyar,**

**Ir. Nyoman Nuadi, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590331 198710 1 001**

Lampiran - Lampiran

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Pembangunan Jalan				60%	65%	70%	75%	80%-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4.	Pemeliharaan/Peningkatan Jalan				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin/ Sarana Pendukung Jalan				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Rehabilitasi Jalan				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat				-	60%	65%	70%	75%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
9.	Penerimaan Sewa Wales				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Pembangunan Jembatan				-	60%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-
11.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				-	60%	65%	70%	75%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
12.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

